

Revitalisasi Pendidikan: Menyoal Format Nasionalisme Kita Jelang Indonesia Emas 2045

Maman Paturahman^{*1}, Yayan Sudrajat², Suyekti Kinanthi Rejeki³, Ni Wayan Ayu Permata Sari⁴

- ^{1,3} Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI
- ² Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI
- ⁴ Universitas Multimedia Nusantara

Email Korespondensi : ¹⁾ maman.patur90@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 20.06.2024

Direvisi : 16.07.2024

Terbit : 31 Juli 2024

KATA KUNCI

Educational
Revitalization,
Nationalism Format.

Abstract

There is no independence of a nation without nationalism. The birth of a country and national passion are always built by a strong sense of nationalism. Nationalism will never be obsolete and will remain the identity of every child of the nation and become the pride of the nation whatever "ism" they adhere to. Nationalism that fades will fade identity and weaken national pride. Therefore, it is necessary to have an effective educational format to maintain the spirit and passion of intergenerational nationalism so that we are not careless ideologically and culturally, especially in realizing a "Golden Indonesia" in 2045.

Keywords: Educational Revitalization, Nationalism Format.

Pendahuluan

Kesadaran nasionalisme kita sebagai bangsa telah dimulai sejak kelahiran Boedi Oetomo yang digagas oleh para pemuda pelajar sekolah kedokteran Hindia Belanda STOVIA (School Tot Oplending Voor Indlande Artsen) pada tanggal 20 Mei 1908. Peristiwa itu disebut sebagai hari kelahiran bangsa Indonesia dan juga disebut zaman perintis, dua puluh tahun kemudian dipertegas dengan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lagi-lagi diprakarsai oleh para pemuda pelajar.

Peristiwa ini disebut sebagai kelahiran persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa ini disebut juga sebagai zaman penegas. Sedangkan puncak perjuangan bangsa Indonesia dari kedua peristiwa tersebut adalah dengan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang juga atas desakan kaum pemuda pelajar. Peristiwa ini disebut sebagai zaman pendobrak. Jika kita telusuri dengan cermat, ketiga peristiwa tersebut yang juga sering disebut sebagai tonggak sejarah panjang bangsa Indonesia dalam upaya melepaskan diri dari belenggu penjajah beberapa abad lamanya, ternyata kehadiran peran pemuda pelajar tidak dapat disangsikan lagi. Mereka adalah pemilik idealisme sejati, demi lahirnya bangsa yang berdaulat yakni Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing.

Ketiga momentum sejarah itu, kini telah kehilangan nyawa juang yang memicu gairah kebangsaan kita sejak diwarisi kemerdekaan selama 79 tahun silam. Nasionalisme kita terasa kian lemah, hal ini bukan hanya disebabkan oleh derasnya arus globalisasi tetapi kita sebagai bangsa telah lengah secara ideologis dan kultural. Itu sebabnya, upaya pembudayaan Pancasila

sebagai budaya leluhur bangsa sepanjang sejarahnya serta upaya memperlakukan paham dan rasa kebangsaan nasional kita perlu diikhtiarkan secara maksimal oleh semua pihak. Jangan biarkan nasionalisme kita sebagai bangsa semakin meluntur dan kedaulatan negara kian compang-camping.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Lexy J. moleong, 2006). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari jurnal-jurnal serta informasi dari website resmi dan terpercaya. Analisis ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang diperoleh selama melakukan penelitian ini akan diolah serta diproses lebih lanjut dengan teori-teori yang ada. Sumber data seperti jurnal, dan website yang didapat dari penelitian menjadi pendukung proses pembuatan artikel ilmiah ini. Penelitian ini dimulai dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Hasil dan Analisis

Menyoal Ideologi dan Budaya Kita

Menurut Poespowardojo (2012: 30) ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Sedangkan menurut Sobur (2014: 6) ideologi adalah pikiran yang mengungkapkan, nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antarpribadi. Adapun definisi kebudayaan menurut Sidi Ghazalba (2016: 17) adalah cara berpikir dan merasa, menyatakan diri dalam seluruh sesi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat dalam suatu ruang dan suatu waktu.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, maka dalam konteks kehidupan berbangsa makna ideologi dan budaya dimaksud adalah pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara dan berfungsi sebagai ideologi (why of life) bangsa kita; penghayatan dan pengamalan, sistem nilai (value system), yang merupakan kristalisasi puncak-puncak luhur budaya bangsa kita sepanjang sejarahnya. Maka, berbagai upaya pengawetan (konservasi) dan menghidupkan kembali (revitalisasi) Pancasila adalah sebuah keniscayaan tanpa reserve.

Diketahui bahwa pada bulan yang lalu kita telah memperingati hari Kelahiran Pancasila tepatnya tanggal 1 Juni 2024, rasanya seperti peringatan hari-hari besar nasional lainnya yang diperingati sebelumnya pada bulan Mei yakni ada dua peristiwa penting yaitu Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Peristiwa tersebut diperingati setiap tahun, Hardiknas diperingati sejak tahun 1960 sedangkan Harkitnas sudah sejak lama yakni pada tahun 1948. Namun kenyataannya, setiap peringatan kedua hari besar nasional tersebut bahkan hari-hari besar nasional lain pun terkesan hanya “seremonial semu” tanpa ada rasa refleksi yang sarat nilai dalam proses pendewasaan kita dalam berbangsa.

Hari Pendidikan Nasional diperingat setiap tahun mestinya menjadi momentum untuk

menegaskan tekad negara tentang doktrin pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai titah pasal 31 UUD 1945 dan bukan sekadar mencerdaskan otak bangsa. Begitu pun dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahun belum dapat memperkuat paham dan rasa kebangsaan nasional kita. Kenyataannya sekolah-sekolah kita, bahkan kampung-kampung kita, terkesan mengabaikan Pancasila dalam substansi dan hakikatnya. Kegagalan membudayakan Pancasila adalah kegagalan pendidikan nasional kita (Swasono, 2015: 1). Karena itu, pendidikan harus tetap menjadi benteng kokoh terdepan dalam memahami, memaknai, deus, dan menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa terlebih dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Harapan ke arah itu harus benar-benar diikhtiarkan secara maksimal oleh semua pihak; keluarga, negara, dan masyarakat.

Kenyataan lain adalah kita sering kali menyelenggarakan kongres dan berbagai seminar tentang Pancasila yang dengan mengusung tema bagaimana menyelamatkan dan melestarikan Pancasila di bumi Ibu Pertiwi ini. Bahkan banyak penulis yang mengulas Pancasila dengan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus halaman baik dalam buku-buku bahan ajar maupun buku-buku referensi keilmuan bagi masyarakat luas. BP7 telah dibubarkan, penataran P4 telah ditiadakan dan pelajaran PMP telah ditiadakan oleh pihak yang mengaku dirinya reformis, padahal terbukti bahwa reformasi akhirnya sebuah delusif, merupakan reformasi dari cita-cita kemerdekaan nasional. Toh, walaupun belakangan ini telah dibentuk dan sedang digodok Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), namun kenyataannya terkesan setengah hati dan bernuansa politik an sich, bukan mencari substansi yang lebih relevan sebagai korelasi atas kekurangan substansi pembudayaan Pancasila pada masa lampau.

Banyak pejabat publik saat berpidato menyampaikan kebijakan-kebijakannya tidak lagi menyebut perkataan Pancasila. Tidak sedikit pula guru, dosen, dan tokoh masyarakat dalam berbagai konteks pendidikan dan kemasyarakatan tanpa sedikit pun menyinggung Pancasila. Dengan demikian, ketidakdugaan bahwa pada usia 100 tahun Republik Indonesia nanti kita sadar tidak perlu lagi peduli dengan Pancasila sebagai Dasar Negara. Tidak penting lagi dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Begitu pun di sekolah-sekolah dan di masing-masing kelas tidak sedikit gambar burung Garuda (Pancasila), bendera merah putih, gambar presiden dan wakil presiden, peta kepulauan Indonesia, serta peta dunia tidak dihadirkan sebagai pajangan kelas, tidak terkecuali di perguruan tinggi. Karena itu, tidak salah jika selama ini banyak perguruan tinggi yang mendirikan program studi yang tidak bercirikan keindonesiaan seperti program studi Ekonomi Pancasila, pusat studi Nusantara, dan sebagainya. Ini sungguh absurd (Swasono, 2015: 13). Hal tersebut tentu berdampak luar biasa, kita akan tetap menjadi bangsa yang terpuruk serta tidak punya visi kebangsaan yang kuat. Kita tidak akan pernah memilih militansi untuk mewujudkan bangsa besar. Kita tetap saja tumpul ideologi, tidak peka perjuangan, luntur nasionalismenya dan tetap memelihara keterjajahan akademis (*academic hegemony*) dan barang kali juga kemiskinan akademis/*academic poverty*. (Swasono, 2015: 14).

Makna Proklamasi Kemerdekaan

Peran pendidikan sangat penting dalam memahami pentingnya bangsa Indonesia benar-benar

terbebas dari penjajahan. Munculnya kesadaran nasionalisme tidak terlepas dari kehadiran sekelompok orang terdidik yang mendapat pencerahan pendidikan di lingkungan STOVIA (School Tot Oplending Voor Indlande Artsen) yang mendirikan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 dipimpin oleh Dr. Soetomo. Tokoh perjuangan lainnya yakni Wahidin Sudirohusodo dan Tjipto Mangunkusumo. Proklamasi kemerdekaan adalah pengejawantahan pernyataan kemerdekaan (declaration of freedom) bangsa Indonesia yang tertuang dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan tersebut memiliki nilai bahwa telah terjadi perubahan politik, hukum, budaya, dan kedaulatan bangsa Indonesia secara mandiri.

Pancasila Milik Kita

Pancasila adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi dari puncak-puncak luhur budaya bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya dengan saripatinya adalah: 1) keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagai Maha Pencipta Semesta; 2) rasa kekeluargaan, cinta kasih sayang serta kebersamaan; 3) rasa gotong-royong dalam berbuat kebajikan; 4) azas tenggang rasa. Secara yuridis formal, Pancasila telah dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945). Ada beberapa pengusul dasar negara Indonesia merdeka yaitu: Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, Ir. Soekarno, dan Panitia Sembilan yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta sebagai cikal-bakal lahirnya Pancasila berikut sila-silanya seperti yang kita kenal selama ini.

Semua telah menjadi akhir musyawarah para pendiri republik ini sekaligus menjadi konsensus nasional. Kesepakatan dapat dicapai karena adanya kesadaran moral yang sangat luhur di antara mereka. Maka akhirnya, rancangan dasar negara tersebut (Pancasila) telah menjadi kepastian keputusan untuk disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri republik seyogyanya kita rawat dan kita lestarikan menjadi sebuah sistem nilai (value system) dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa siapa pun terlebih lagi masyarakat akademik harus menerima adanya budaya Pancasila; Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia sendiri harus benar-benar disosialisasikan, harus ada proses enculturation.

Karena Pancasila itu telah menjadi milik kita semua maka tidak diharapkan atau kita mendengar sikap seseorang; tokoh, elit politik, golongan, organisasi, dan atau kelompok tertentu yang terkesan mengerdilkan atau mereduksi Pancasila dengan kepicikan pikirannya. Mengklaim sebagai orang yang paling berjasa atas kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, mengaku-ngaku sebagai ormas Pancasila. Sikap ini bukan hanya sekadar mereduksi Pancasila tetapi telah membuka celah polarisasi dalam masyarakat dengan munculnya sebutan kelompok Pancasila dan kelompok anti Pancasila yang sesungguhnya kelompok ini lebih Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, persepsi atas identitas tidak boleh terjadi lagi toh kenyataannya, orang atau kelompok yang tepuk-tepuk data paling mendukung Pancasila ternyata sering juga meresahkan masyarakat karena arogansi dan bertindak "semau gue" (anti kemapanan). Sebaliknya, banyak orang juga kelompok tertentu yang tidak pernah tempel-tempel atribut Pancasila (burung Garuda), bendera merah putih, dan lencana republikan lainnya, tetapi sikap dan kelakuannya lebih disiplin, tertib, toleran, peduli terhadap sesama, dan punya "sense" atas lingkungannya. Bagi kelompok ini, Pancasila bukan kata-kata di mulut dan pakai atribut, melainkan telah melembaga pada dadanya dan telah

mengalir dalam darahnya. Demikian, sekarang dan ke depan tidak ada “pengklaiman” atas Pancasila, tidak ada reduksi Pancasila, tidak ada polarisasi Pancasila dalam masyarakat, dan tidak ada eksklusivisme terhadap “hak paten” Pancasila.

Peran Pendidikan

Menurut Arifin (2011: 14), pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun ruhani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan menurut Idris (2014: 19) pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang dipilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka secara implisit hakikat pendidikan dipahami sebagai usaha sadar tujuan untuk mendewasakan setiap individu agar ia dewasa. Sedangkan esensi dewasa ditandai oleh kesadaran dan kemampuan penyesuaian diri (*adjustment*) baik secara autoplastis maupun alloplastis. Kesadaran dan kemampuan penyesuaian diri tersebut akan menjelma dengan baik jika secara instrinsik setiap individu memiliki karakter yang kuat. Perlunya pendidikan karakter telah lama diperbincangkan oleh kalangan kaum intelektual pendidik, begitu pun halnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan agar seluruh sekolah di semua jenjang dan jenis harus berada di garis depan dalam pendidikan karakter bangsa.

Menurutnya, karakter tersebut meliputi religius, nasionalis, gotong-royong, integritas, dan mandiri. Pendidikan karakter ini secara monumental dirancang secara implementatif dengan nama Kurikulum Berbasis Karakter, Kurikulum Merdeka, dan P5. Sedangkan di kalangan kaum nasionalis, pendidikan karakter dieksplisitkan oleh Swasono (2015: 27) sebagai berikut: Pendidikan untuk membentuk dan mempertegas jati diri; pendidikan untuk mempertebal harga diri; pendidikan untuk mempertegas percaya diri; pendidikan mempertebal iman; pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya saling menghormati, berungguh-ungguh, sopan santun; pendidikan mengajarkan dan mencontohkan bertoleransi, menghormati, dan menghargai perbedaan; pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya bersahabat, ramah, tolong-menolong (*friendly*) dan menghargai pertemanan; sabar, mampu mengendalikan emosi; pendidikan menumbuhkan kepekaan estetika dan artistika untuk membentuk sikap kritis, apresiatif, dan kreatif; pendidikan membentuk karakter tangguh sebagai bangsa menjadi berharkat bermartabat, berjati diri, digdaya, dan mandraguna dalam rangka nasional dan pengembangan karakter; pendidikan untuk memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kerakyatan (tahta untuk rakyat); pendidikan memantapkan kesadaran geografis (*territorial awareness*) untuk mengenal keberadaan diri/ ground zero dan kesadaran sejarah (*survival awareness*) untuk memperkuat jati diri bangsa; pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa (konsepsi budaya) tidak sekadar untuk mencerdaskan otak bangsa (konsepsi biologis genetika), menghilangkan minderwaadig (*servility, underdog mentality*); pendidikan mengangkat kemampuan bangsa untuk proaktif ikut mendesain masa depan dunia; pendidikan untuk

mendorong proses modernisasi yang tidak identik dengan westernisasi, tetapi sebaliknya modernisasi adalah untuk mempertegas keindonesiaan; pendidikan untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila.

Simpulan

Berdasarkan butir-butir tersebut tentang pendidikan kerangka sangat luas, karena itu seluruh guru pendidik dalam arti luas perlu berbagi pengalamannya untuk mengisi dalam memadai butir-butir diolah dengan berpegang teguh pada Trisentra Pendidikan; keluarga, negara, dan masyarakat. Fungsi “keayahbunda” (parenting dan parenthood) sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi keluarga; agama, pemelihara, pendidikan, ekonomi, sosial, biologis, dan sebagainya. Begitupun peran guru harus betul-betul dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu, kualifikasi praksional dan kompetensi guru harus mendarah daging pada dirinya. Begitu pun masyarakat luas harus sama-sama peduli (care) atas keadaan pendidik kita sekarang dan yang akan datang.

Kesadaran nasionalisme yang telah dirintis telah kelahiran Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 adalah sebuah momentum yang harus tetap berkobar hingga saat ini. Nasionalisme tidak boleh dipandang “usang” serta harus tetap menjadi kebanggaan Indonesia apapun “isme” yang disandangnya. Nasionalisme yang luruh akan melunturkan identitas serta memperlemah kebanggaan kebangsaan kita.

Nasionalisme dalam konteks kekinian harus dipahami sebagai semangat dan “ghirah” kebangsaan dengan mereaktualisasikan nilai-nilai ideologi dan budaya bangsa kita sepanjang sejarahnya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara nyata.

Pendidikan memegang peranan strategis untuk mewujudkan harapan tadi, karena itu lembaga pendidikan; keluarga, sekolah, dan masyarakat harus lebih dihidupkan kembali (revitalisasi) terutama dalam membentuk dan mengembangkan karakter segenap anak bangsa antargenerasi sebagai pengejewantahan atas nilai-nilai Pancasila dan budaya adi luhung moyang kita.

Mengingat strategisnya peran pendidikan dalam membentuk dan mengembangkan potensi segenap anak bangsa dalam konteks konversi nasionalisme; ideologis dan kultural maka kehadiran keluarga harus benar-benar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik; agama, pemeliharaan, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Begitu pun kehadiran sekolah sebagai “kaki tangan” negara harus dapat mengimplementasikan cita-cita Proklamasi khususnya dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta amanat UUD 1945 yang regulasinya telah diatur oleh pemerintah. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa lebih berdimensi kedaulatan budaya dan bukan sekadar mencerdaskan “otak bangsa”. Karena itu, pembudayaan Pancasila harus menjadi keniscayaan semua jenjang dan jenis sekolah.

Karena itu pula, sekolah harus menjadi pusat budaya dan keadaban antargenerasi. Maka, keteladanan (role model) segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam segala hal harus menjadi gerbang kehidupan yang sesungguhnya bagi setiap anak didik. Begitu pun masyarakat, harus punya kepedulian yang sama atas masa depan anak-anak bangsa khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berbagai upaya edukatif harus dapat menciptakan antarunsur masyarakat secara simultan. Begitu pun berbagai perilaku demagog anak-anak

bangsa selama ini harus menjadi keprihatinan bersama. Tri Sentra pendidikan tersebut, harus menjadi komitmen sinergis satu sama lain dalam mewujudkan harapan kita bersama.

“Mari kita tunduk pada pikiran yang lebih baik” (Salvo Meliori Indicio).

Referensi

Alex, Sobur. (2014). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arifin. (2011). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Gazalba, Sidi. (2016). *Sistematika Filsafat: Buku Pertama Pengantar Kepada Dunia Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Idris, Zahara. (2014). *Dasar-Dasar Kependidikan: Cetakan Kedua*. Padang: Angkasa Raya.

Poespowardojo, Tarcisius Michael Soerjanto. (2021). *Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Roh Revolusi Mental*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Swasono, Sri Edi. (2015). *Pendidikan Nasional Menuju Indonesia Emas; Kelengahan Ideologis & Kelengahan Kultural*. Jakarta: Badan Musyawarah Perguruan Swasta.